

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro diakui secara global dan nasional sebagai fondasi (tulang punggung) perekonomian suatu negara. Peran krusial ini mencakup kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sekaligus menjadi motor utama dalam penciptaan lapangan kerja yang masif dan efektif dalam menekan angka pengangguran. Sumber Perekonomian tidak hanya bergantung pada sektor-sektor formal berskala besar, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ekonomi informal, yang sebagian besarnya digerakkan oleh Usaha Mikro. Usaha mikro merupakan salah satu pilar perekonomian yang menggerakkan perekonomian Indonesia dan berkembang dengan sangat cepat dan luas. Keberadaan usaha mikro tidak sekadar berfungsi sebagai roda penggerak instrumen pertumbuhan perekonomian masyarakat di tingkat lokal, melainkan juga bertindak sebagai katalisator strategis dalam mempercepat pemerataan dan pendistribusian pendapatan secara inklusif ke berbagai lapisan sosial. Melalui kemampuannya menyerap tenaga kerja informal dalam skala masif serta menciptakan lapangan kerja mandiri (*self-employment*), sektor ini secara efektif mampu meminimalkan ketimpangan ekonomi (*income inequality*), menekan angka pengangguran di tingkat akar rumput, meningkatkan daya beli rumah tangga, serta mendorong perputaran likuiditas keuangan daerah secara lebih mandiri dan berkeadilan. Usaha mikro tersebut memainkan peran dalam pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2018, Usaha mikro berperan besar terhadap PDB dengan nilai sejumlah 61,97% atau 8.573,89 triliun rupiah dan tenaga kerja yang digunakan sejumlah 97%, menurut data oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Aliyah, 2022).

Ketahanan luar biasa dan daya adaptasi yang tinggi ini pada dasarnya bersumber dari fleksibilitas struktur operasional usaha mikro yang cenderung ramping, minimalis, dan tidak birokratis, sehingga memberikan mereka kelincahan yang tinggi untuk secara cepat beralih strategi bisnis, melakukan pivot, atau memodifikasi lini produk demi merespons pergeseran permintaan pasar serta preferensi konsumen yang berubah secara drastis. Di sisi lain, karena sebagian besar dari unit usaha ini mengandalkan ketersediaan bahan baku lokal yang

melimpah dan secara spesifik melayani ceruk pasar konsumsi domestik di tingkat akar rumput, sektor informal ini memiliki benteng pertahanan tersendiri yang membuat mereka tidak terlalu rentan atau terdampak langsung oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing, inflasi global, maupun kompleksitas gangguan rantai pasok internasional (*global supply chain disruption*) yang kerap kali melumpuhkan stabilitas operasional berskala besar. Perannya sebagai penyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional menjadikannya jaring pengaman sosial yang krusial, memastikan tingkat konsumsi masyarakat tetap terjaga juga roda ekonomi tetap berputar di tingkat akar rumput bahkan dalam kondisi paling sulit. Bab 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Pasal 1 menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sedangkan usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan menghasilkan, yang dijalankan oleh individu atau entitas yang merupakan bagian dari anak perusahaan dari perusahaan yang memiliki dan mengendalikan, serta berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kategori usaha kecil. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu serta badan yang tidak termasuk anak perusahaan atau cabang dari perusahaan, dan juga bukan merupakan perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau perusahaan besar berdasarkan total kekayaan bersih atau pendapatan tahunan (Hidayat *et al.*, 2022).

Usaha mikro sering kali dihadapkan pada barisan tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan akses permodalan, tata kelola keuangan yang belum terstruktur, hingga belum optimalnya strategi pemasaran di tengah persaingan pasar. Kendati demikian, di luar kendala internal tersebut, pemilihan lokasi usaha hadir sebagai fondasi paling mendasar yang menentukan napas keberlanjutan dan keberhasilan usaha mikro, khususnya pada sektor perdagangan serta jasa. Keberadaan lokasi yang strategis tidak hanya berperan mendongkrak volume penjualan harian secara langsung, tetapi juga berdampak terhadap efisiensi biaya operasional, tingkat keterjangkauan bagi konsumen, daya saing dengan kompetitor sejenis, hingga pembentukan persepsi serta citra usaha di mata pelanggan. (Ikhlās & Jafnihirida, 2021).

Tabel 1.1 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Timur 2026

No	Kabupaten/Kota	UMR
1.	Kota Surabaya	Rp. 5.288.796
2.	Kabupaten Gresik	Rp. 5.195.401
3.	Kabupaten Sidoarjo	Rp. 5.191.541
4.	Kabupaten Pasuruan	Rp. 5.187.681
5.	Kabupaten Mojokerto	Rp. 5.176.101
6.	Kabupaten Malang	Rp. 3.802.862
7.	Kota Malang	Rp. 3.736.101
8.	Kota Batu	Rp. 3.562.484
9.	Kota Pasuruan	Rp. 3.555.301
10.	Kabupaten Jombang	Rp. 3.320.770
11.	Kabupaten Tuban	Rp. 3.229.092
12.	Kota Mojokerto	Rp. 3.208.556
13.	Kabupaten Lamongan	Rp. 3.196.328
14.	Kabupaten Probolinggo	Rp. 3.164.526
15.	Kota Probolinggo	Rp. 3.045.172
16.	Kabupaten Jember	Rp. 3.012.197
17.	Kabupaten Banyuwangi	Rp. 2.989.145
18.	Kota Kediri	Rp. 2.742.806
19.	Kabupaten Bojonegoro	Rp. 2.685.983
20.	Kabupaten Kediri	Rp. 2.651.603
21.	Kota Blitar	Rp. 2.639.518
22.	Kabupaten Tulungagung	Rp. 2.628.190
23.	Kabupaten Lumajang	Rp. 2.588.794
24.	Kota Madiun	Rp. 2.578.320
25.	Kabupaten Blitar	Rp. 2.567.744
26.	Kabupaten Magetan	Rp. 2.564.627
27.	Kabupaten Sumenep	Rp. 2.556.815
28.	Kabupaten Nganjuk	Rp. 2.553.866
29.	Kabupaten Ponorogo	Rp. 2.553.688
30.	Kabupaten Madiun	Rp. 2.533.221
31.	Kabupaten Ngawi	Rp. 2.550.274
32.	Kabupaten Bangkalan	Rp. 2.549.876
33.	Kabupaten Trenggalek	Rp. 2.530.313
34.	Kabupaten Pamekasan	Rp. 2.528.004
35.	Kabupaten Pacitan	Rp. 2.514.892
36.	Kabupaten Bondowoso	Rp. 2.496.886
37.	Kabupaten Sampang	Rp. 2.484.443
38.	Kabupaten Situbondo	Rp. 2.483.962

Sumber : Keputusan Gubernur Jawa Timur, 2025.

Tabel 1.1 menjelaskan terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, yang mencerminkan tingkat standar upah pekerja di masing-masing wilayah berdasarkan kondisi ekonomi setempat. Dari data tersebut terlihat bahwa daerah dengan UMK tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar Rp4.961.753,00, diikuti oleh kawasan industri penyangga seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto yang semuanya berada di kisaran Rp4,8 juta, menunjukkan tingginya aktivitas industri dan kebutuhan hidup di wilayah tersebut. Daerah-daerah lain seperti Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu memiliki UMK yang lebih rendah namun masih relatif menengah, mencerminkan struktur ekonomi yang lebih beragam antara industri, jasa, dan pariwisata. Di sisi lain, sebagian besar kabupaten di wilayah tapal kuda dan Madura seperti Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sumenep berada pada kelompok UMK terendah, yaitu sekitar Rp2,3 juta hingga Rp2,4 juta, yang mengindikasikan tingkat biaya hidup dan produktivitas ekonomi yang relatif lebih rendah. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan adanya kesenjangan upah antarwilayah di Jawa Timur yang dipengaruhi oleh faktor industrialisasi, investasi, tingkat urbanisasi, serta perkembangan ekonomi lokal masing-masing daerah (Timur et al., 2026).

Tabel 1.2 Jumlah Usaha Mikro di Madura 2022

No	Kabupaten/Kota	Banyak Usaha
1	Pamekasan	67.609
2	Sumenep	31.691
3	Bangkalan	20.344
4	Sampang	15.389

Sumber : BPS, 2023.

Tabel 1.2 menjelaskan terkait dengan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Madura Berdasarkan data persebaran usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Madura, terlihat adanya ketimpangan antar kabupaten. Kondisi yang paling kontras terlihat pada Kabupaten Sampang yang menempati posisi terakhir dengan jumlah usaha terendah, yaitu hanya sebesar 15.389 unit usaha. Rendahnya angka ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kewirausahaan di Kabupaten Sampang masih menghadapi tantangan besar, baik

dari sisi aksesibilitas ruang usaha maupun dukungan infrastruktur ekonomi yang mampu menstimulasi munculnya unit usaha baru.

Kehadiran Alun-Alun Trunojoyo sebagai ruang publik pusat kota menjadi sangat krusial ruang ini tidak hanya berguna sebagai sarana rekreasi, ada pula sebagai instrumen strategis untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan menyediakan lokasi usaha yang memiliki daya tarik spasial tinggi. Melalui konsentrasi aktivitas ekonomi di alun-alun, diharapkan para pelaku usaha mikro di Sampang dapat mengoptimalkan rasionalitas ekonomi mereka dalam pemilihan lokasi, guna meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan jumlah usaha mikro agar lebih kompetitif dengan kabupaten lainnya di Pulau Madura.

Usaha mikro di Madura memainkan peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi daerah sekaligus penjaga stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Di wilayah Madura, usaha mikro bukan hanya berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, melainkan juga menjadi penggerak utama roda perekonomian lokal yang mampu menjangkau hingga ke tingkat desa dan pelosok. Dengan kontribusinya yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penguatan dan pengembangan usaha mikro di Madura menjadi aspek penting, terutama dalam menghadapi tantangan global dan persaingan pasar yang kian meningkat. Usaha mikro juga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah internasional (Syaifullah, 2025).

Karakteristik usaha mikro yang fleksibel dan adaptif membuatnya mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, seperti yang terlihat pada masa pandemi, di mana banyak pelaku usaha tetap beroperasi dengan berbagai inovasi. Di sisi lain, usaha mikro di Madura juga menjadi sarana pelestarian kearifan lokal, baik melalui produk kerajinan, kuliner khas, maupun jasa berbasis budaya yang mencerminkan identitas daerah. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan agar usaha mikro dapat berkembang lebih optimal, meningkatkan daya saing, serta mampu menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional (Syaifullah, 2025).

Usaha mikro yang berada di Pulau Madura mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, tidak hanya dari segi jumlah, juga dari aspek kualitas serta pemasaran

produk. Produk usaha mikro Madura bahkan telah mampu menembus pasar luar negeri. Berbagai usaha terus dilakukan untuk memperkuat sektor usaha mikro, khususnya usaha mikro yang berada di Pulau Madura. Peningkatan kinerja usaha mikro dari tahun ke tahun bukanlah jaminan bahwa seluruh permasalahan dan kendala yang dihadapi usaha mikro di Madura dapat teratasi. Salah satu kendala yang masih sering dihadapi adalah pendapatan dan perilaku pengelolaan keuangan para pelaku usaha mikro (Novianti, 2021).

Tabel 1.3 Rekapitulasi usaha mikro berdasarkan jenis sektor usaha yang tersebar di Kabupaten Sampang tahun 2025

No.	Kecamatan	Sektor																Jumlah		Total
		Mumin		Perdagangan		Pertanian		Perikanan		Peternakan		Pertambangan		Industri		Jasa				
		Mikro	NIB	Mikro	NIB	Mikro	NIB	Mikro	NIB	Mikro	NIB	Mikro	NIB	Mikro	NIB	Mikro	NIB	NIB	Mikro	
1	Sresih	131	47	208	24	1	0	12	3	3	3	1	0	55	17	66	7	101	477	578
2	Torjun	472	230	634	313	110	60	7	4	177	79	3	1	25	5	254	88	780	1,682	2,462
3	Sampang	1,540	579	2,429	504	19	10	25	11	60	28	19	3	47	32	851	259	1,426	4,990	6,416
4	Camplong	715	94	1,060	104	134	19	87	9	119	20	4	0	98	20	414	37	303	2,631	2,934
5	Omben	1,025	51	1,068	136	236	7	9	4	18	3	3	0	191	8	350	40	249	3,500	3,749
6	Kedungdung	656	46	647	44	13	2	7	2	586	2	2	0	9	5	232	20	121	2,152	2,273
7	Jrengk	450	41	476	22	37	0	12	0	68	1	0	1	11	1	196	3	69	1,250	1,319
8	Tambelangan	392	64	374	38	0	0	2	1	11	4	1	1	10	1	88	20	129	878	1,007
9	Banyuwates	296	38	794	48	21	7	22	5	194	13	0	0	23	4	224	29	144	1,574	1,718
10	Robatal	843	53	950	89	6	3	26	1	241	2	2	0	4	2	188	30	180	2,260	2,440
11	Sokobanah	198	44	385	15	4	1	27	13	16	1	0	0	16	7	77	6	87	723	810
12	Ketapang	430	44	624	24	8	0	10	2	15	0	1	0	26	7	116	11	88	1,230	1,318
13	Pangarengan	440	102	902	144	2	2	10	3	146	19	5	5	16	8	238	16	299	1,759	2,058
14	Karangpenang	173	23	307	44	6	1	1	0	52	2	4	2	206	37	122	14	123	871	994
Total		7,761	1,456	11,458	1,549	597	112	257	58	1,706	177	45	13	737	154	3,416	580	4,099	25,977	30,076

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab Sampang, 2026.

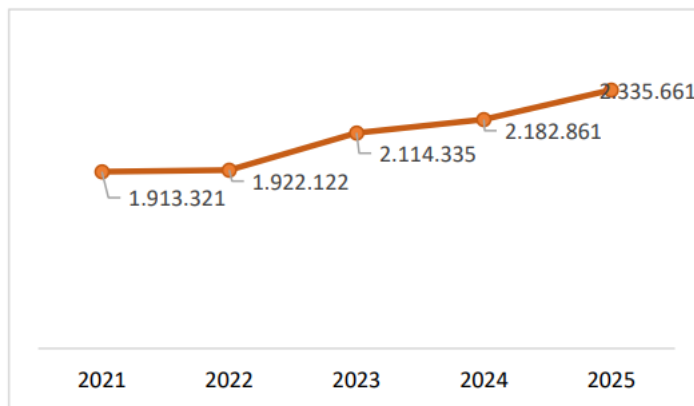
Tabel 1.3 menjelaskan terkait dengan data yang disajikan, menurut dinas koperasi perindustrian dan perdagangan, terdapat total 30.076 unit usaha yang tersebar di 14 kecamatan, dengan rincian 25.977 usaha kategori Mikro dan 4.099 unit yang telah memiliki NIB. Sektor Perdagangan menjadi penggerak ekonomi paling dominan dengan total 13.007 unit usaha (Mikro dan NIB gabungan), disusul oleh sektor mamin (Makanan dan Minuman) yang mencapai 9.217 unit usaha secara keseluruhan. Sebaliknya, sektor Pertambangan merupakan sektor dengan aktivitas paling rendah, hanya mencatat total 58 unit usaha di seluruh wilayah tersebut.

Secara geografis, Kecamatan Sampang merupakan pusat aktivitas usaha terbesar dengan total 6.416 unit, yang terdiri dari 4.990 usaha Mikro dan 1.426 usaha ber-NIB. Posisi berikutnya diikuti oleh Kecamatan Omben dengan total 3.749 unit usaha dan Kecamatan Camplong dengan 2.934 unit usaha. Kecamatan Sreseh memiliki jumlah unit usaha paling sedikit dibandingkan wilayah lainnya,

yakni hanya sebanyak 578 unit usaha. Menurut dinas koperasi perindustrian dan perdagangan terdapat 163 pelaku usaha mikro mamin di Alun-Alun trunojoyo Kab Sampang.

Alun-alun sebagai tempat publik yang sangat diminati oleh masyarakat, pemerintah harus memastikan bahwa alun-alun dikelola dengan baik. Di Kabupaten Sampang, salah satu pusat kegiatan ekonomi informal yang paling menonjol adalah Alun-Alun Trunojoyo. Alun-alun ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi dan interaksi sosial, tetapi telah bertransformasi menjadi sentra ekonomi yang hidup (Rohmah, 2022). Karakteristik lokasi ini sebagai ruang publik yang ramai dan strategis menjadikannya sangat atraktif bagi perdagangan, yang kemudian menciptakan fenomena aglomerasi usaha mikro. Fenomena aglomerasi ini pada gilirannya menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang unik dan dinamis, di mana para pelaku usaha mamin secara kolektif membentuk sebuah pusat pasar terbuka yang representatif. Kawasan kuliner rakyat ini tidak sekadar menjadi tempat transaksi, melainkan telah menjelma menjadi destinasi wisata ikonik dan ruang publik yang secara konsisten mampu menarik minat kunjungan serta menggaet gelombang wisatawan, baik dari dalam kota maupun luar Kabupaten Sampang. Usaha Mikro yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor internal, seperti motif ekonomi, juga faktor eksternal, seperti lingkungan juga habitat ekonomi, memengaruhi adanya keberlangsungan Usaha Mikro (Undari, 2021).

Wilayah Madura dengan potret tingkat kesejahteraan masyarakat serta indeks pembangunan manusia yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar dan terus diupayakan akselerasinya secara struktural, Kabupaten Sampang secara faktual berdasarkan data ketenagakerjaan tercatat memiliki besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang menempati posisi rentan, yakni sebagai salah satu yang paling rendah di seluruh bentangan Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Situbondo. Implikasi sistemik dari kondisi asimetris berupa struktur upah sektor formal yang sangat minim dan terbatas ini secara tidak langsung menciptakan tekanan ekonomi yang berhulu pada rendahnya daya serap pasar kerja formal, sekaligus memicu stimulus sosial-ekonomi yang memaksa masyarakat lokal di tingkat akar rumput untuk bergerak lebih aktif, mandiri, adaptif, dan inovatif dalam menciptakan peluang ekonomi baru sektor informal melalui payung usaha mikro makanan dan minuman.



Gambar 1.1 Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sampang, 2021-2025

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, 2025.

Gambar 1.1 menjelaskan terkait dengan besar upah minimum Kabupaten Sampang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 terjadi kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari 2,18 juta rupiah di tahun 2024 menjadi 2,33 juta rupiah di tahun 2025. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh mulai membaiknya perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19 yang mengharuskan pelaku usaha menaikkan upah/gaji buruh/karyawan akibat omzet yang mulai naik kembali.

Kondisi ekonomi para pelaku usaha mikro makanan dan minuman di Alun-Alun Trunojoyo Kabupaten Sampang saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendapatan riil dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sampang, di mana penghasilan harian yang diperoleh sebagian besar pedagang belum mampu melampaui atau setidaknya setara dengan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sampang. Meskipun lokasi tersebut merupakan pusat keramaian dan ikon baru daerah yang menjanjikan arus pengunjung tinggi, kegiatan berjualan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hari ini tanpa adanya surplus yang memadai. Ketidakmampuan mencapai ambang batas upah minimum ini menciptakan fenomena unik dan menarik bagi penelitian ekonomi, karena di tengah keterbatasan profitabilitas tersebut, para pedagang tetap menunjukkan persistensi yang tinggi untuk mempertahankan eksistensi usahanya di kawasan Alun-Alun Trunojoyo.

Keputusan pemilihan lokasi penelitian secara spesifik di Kabupaten Sampang didasari oleh realitas struktur ekonominya yang unik, di mana daerah ini memiliki tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang relatif rendah di Provinsi Jawa Timur namun memiliki populasi penduduk usia produktif yang cukup besar. Kondisi ini menciptakan keterbatasan serapan pada sektor kerja formal dan mendorong masyarakat untuk bergantung pada aktivitas ekonomi informal sektor makanan dan minuman sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*). Di dalam peta spasial Kabupaten Sampang sendiri, keberadaan Alun-Alun Trunojoyo menghadirkan fasilitas dan estetika yang lebih baik jika dibandingkan dengan ruang publik lama seperti Taman Monumen Sampang. Taman Monumen Sampang secara historis merupakan ruang publik yang lebih dulu ada, lokasinya kini cenderung pasif, memiliki fasilitas penunjang yang terbatas, serta tidak lagi memiliki daya tarik akumulatif (*anchor attractors*) yang mampu memicu kerumunan massa secara masif. Sebaliknya, Alun-Alun Trunojoyo pasca-revitalisasi total dan peresmian pada akhir tahun 2022 telah bertransformasi menjadi pusat gravitasi sosial-ekonomi baru yang dilengkapi infrastruktur modern, pencahayaan memadai, keindahan arsitektural ikonik, serta penataan zonasi usaha yang terstruktur dari dinas terkait. Fenomena ini secara sistematis menggeser konsentrasi lalu lintas konsumen (*traffic density*) dan memicu pola aglomerasi usaha mikro makanan dan minuman secara terpusat di Alun-Alun Trunojoyo. Oleh karena itu, Alun-Alun Trunojoyo menjadi arena penelitian yang jauh lebih representatif untuk mengkaji bagaimana para pelaku usaha mikro memanfaatkan keunggulan lokasi strategis tersebut demi mengoptimalkan pendapatan serta menjaga kelangsungan usahanya di tengah ketimpangan ekonomi daerah.

Gap penelitian yaitu terdapat kesenjangan antara pendapatan para pelaku usaha mikro dengan upah minimum kabupaten/kota di Kabupaten Sampang, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui apa yang menjadikan alasan para pelaku usaha mikro tersebut tetap menjalankan kegiatan ekonominya di lokasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, menyoroti pentingnya usaha mikro dan pemilihan lokasi di Alun-Alun Trunojoyo, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pelaku usaha mikro mamin dalam memilih Alun-Alun Trunojoyo sebagai ruang bertahan hidup ekonomi mereka?
2. Bagaimana pendapatan pelaku usaha mikro di Alun-Alun Trunojoyo di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hal apa saja yang melatarbelakangi para pelaku usaha mikro makanan dan minuman (mamin) dalam mempertahankan keberlangsungan kegiatan ekonominya di Alun-Alun Trunojoyo Kabupaten Sampang.
2. Untuk mendeskripsikan kondisi pendapatan para pelaku usaha mikro di kawasan Alun-Alun Trunojoyo Kabupaten Sampang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya terkait teori aglomerasi usaha mikro dan perilaku ekonomi pelaku usaha di sektor informal pada ruang publik.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji fenomena strategi bertahan hidup (*survival strategy*), dan dinamika usaha mikro di tingkat daerah.

Manfaat Praktis:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang: Sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam mengelola Alun-Alun Trunojoyo. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah memahami faktor-faktor pendorong usaha sehingga penataan pedagang makanan dan minuman (mamin) ke depan tidak hanya rapi secara estetika, namun juga tetap mendukung stabilitas pendapatan dan keberlangsungan ekonomi mereka.
2. Bagi Pelaku Usaha Mikro: Memberikan informasi dan gambaran objektif mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan usaha di lokasi tersebut. Hasil ini dapat digunakan oleh para pedagang sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi operasional yang lebih baik agar pendapatan tetap stabil di tengah persaingan aglomerasi usaha di kawasan pusat kota.